



**BANGKA
2020**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN TAHUN 2018-2023**

KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satunya adalah pembangunan dibidang kesehatan. Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang terarah dan terukur, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk kurun waktu tahun 2018-2023, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kesehatan.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua unsure Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi “ Bangka Setara (Sejahtera dan Mulia).”

Semoga upaya kita mendapatkan ridho dan hidayah-Nya. Amin

Sungailiat, Desember 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA



THEN SUYANTI

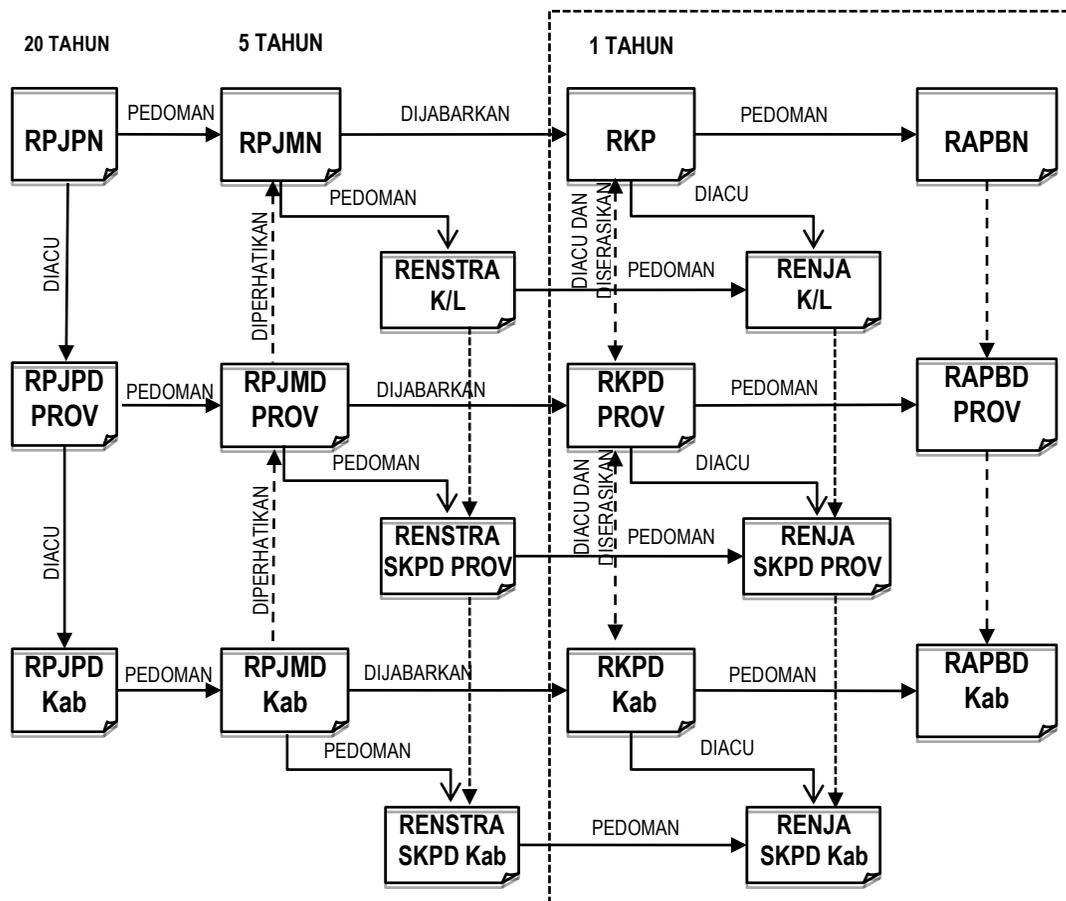
BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan kegiatan, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyusun Perubahan Renstra Tahun 2019-2023.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dalam proses penyusunan renstra Dinas Kesehatan dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Tahapan penyusunan renstra Dinas Kesehatan melalui tahap persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 10 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 77);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bangka;
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 59 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 63)

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam menyusun Rencana Kerja OPD dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Bangka dalam kurun waktu lima tahun. Perubahan Rencana strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka merupakan pedoman sektor kesehatan di Kabupaten Bangka dan juga dapat dipergunakan oleh seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bangka, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka.

Perubahan Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kesehatan (Musrenbangkes).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perubahan maka Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka beserta jaringannya, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bangka, DPRD, swasta dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan secara umum di Kabupaten Bangka saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
4. Memudahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka beserta jaringannya, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka, DPRD, swasta dan masyarakat di Kabupaten Bangka dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memberikan arah bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka beserta jaringannya, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bangka, DPRD, swasta dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan keputusan Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2016, tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

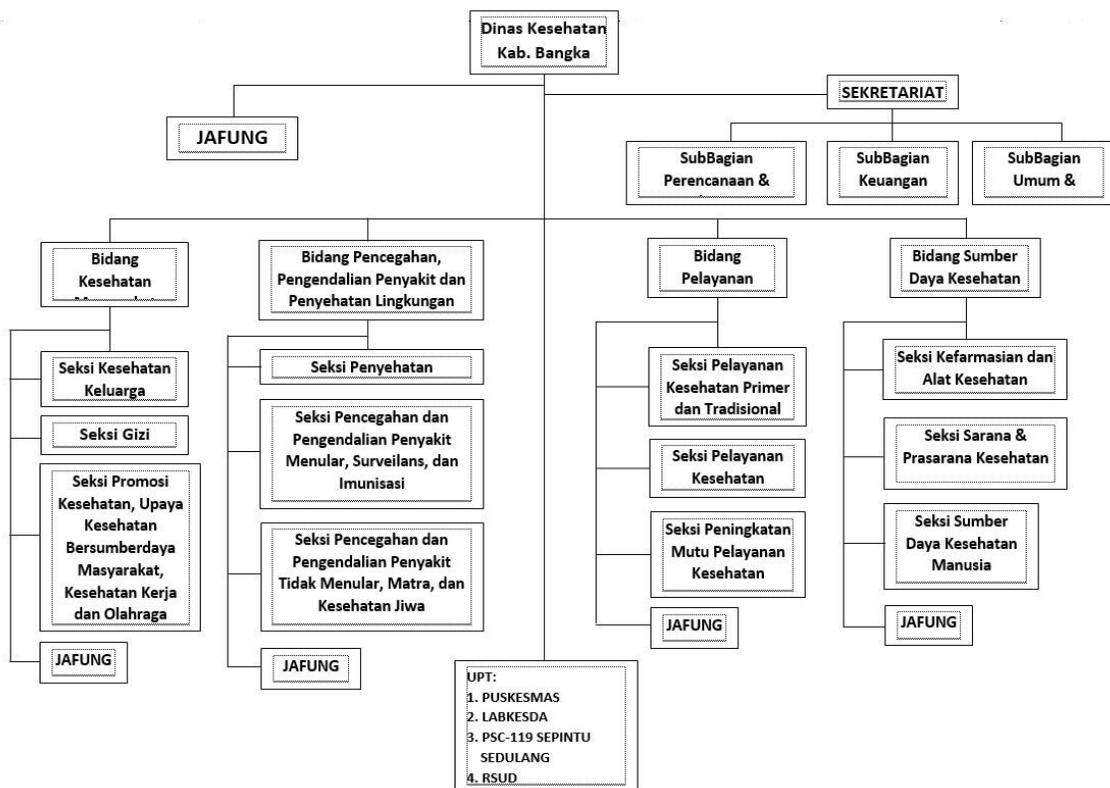
- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis ; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat yang membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi; dan
 3. Seksi Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, Kesehatan Kerja Dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang membawahi:
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular, Surveilans dan Imunisasi; dan

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular, Matra dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan yang membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan yang membawahi:
 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan:

a. Tugas pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang Kesehatan;
- 2) Penyusunan program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 3) Pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Kesehatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- 5) Pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraanserta pengembangan pelayanan kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang pelayanan Kesehatan;
- 7) Penyelenggaraan Kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
- 8) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang kesehatan sesuai dengan Kewenangan;
- 9) Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang kesehatan, kesekretariatan dan pembinaan UPT;
- 10) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas; dan
- 11) Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretaris

a. Tugas pokok

- 1) mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- 2) melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- 3) melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- 4) mengkoordinasi dan penyusunan produk hukum di bidang Kesehatan di daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- 5) menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- 6) mengkoordinasi dan pengelolaan data dan informasi Kesehatan untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
- 7) menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 8) mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
 - 9) mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta barang milik daerah (BMD);
 - 10) mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
 - 11) mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
 - 12) mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang Kesehatan;
 - 13) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
 - 14) mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPK);
 - 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan pada Dinas Kesehatan.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- 2) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kesehatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kesehatan;
- 3) penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kesehatan;
- 4) penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 5) penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, asset di lingkungan Dinas Kesehatan;
- 6) pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang kesehatan;
- 7) penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- 8) penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;

- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekretariat membawahi 3 (Tiga) sub bagian.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- 2) Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- 3) Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspem dan lain-lain;
- 4) Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- 5) Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspem dan lain-lain;
- 6) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- 7) Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- 8) Mengendalikan arsip aktif;
- 9) Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
- 10) Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- 11) Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- 14) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- 2) melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;

- 3) menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- 7) menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- 8) melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- 9) menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- 10) mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- 12) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Mempunyai Tugas

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- 2) melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan RKA;
- 3) menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 4) mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Dinas kesehatan ;
- 5) melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas kesehatan;
- 6) menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
- 7) menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan kegiatan pada Dinas kesehatan;
- 8) melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Kegiatan pada Dinas Kesehatan;

- 9) menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan Semesteran dan Tahunan Dinas;
- 10) menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/LPPD/LKPJ Dinas;
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 12) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis serta supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- Seksi Kesehatan Keluarga

- 1) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan kesehatan keluarga, meliputi : Kesehatan Ibu, Kesehatan

Anak, Kesehatan Remaja, Kesehatan Lansia dan Pelayanan Keluarga Berencana;

- 2) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga;
- 3) melaksanakan kegiatan kesehatan keluarga;
- 4) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan kesehatan keluarga;
- 5) menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan kesehatan keluarga;
- 6) monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan keluarga;
- 7) melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan kesehatan keluarga;
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Gizi**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan gizi, meliputi : gizi keluarga di setiap siklus kehidupan, gizi masyarakat yaitu masalah kekurangan gizi, anemia, gangguan akibat kekurangan iodium, kurang vitamin A dan gizi lebih serta gizi di institusi sesuai kewenangan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan gizi;
- 3) Melaksanakan kegiatan perbaikan gizi;
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan gizi;
- 5) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah gizi;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan gizi;
- 7) Monitoring dan evaluasi kegiatan gizi;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan gizi;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olahraga**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 3) Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 6) Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

a. Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis serta supervisi di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:

- **Seksi Penyehatan Lingkungan**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan penyehatan lingkungan, meliputi: penyehatan air, sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, hygiene sanitasi pangan dan pengamanan limbah, udara dan radiasi;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan;
- 3) Melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan;
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan penyehatan lingkungan;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan penyehatan lingkungan;
- 6) Monitoring dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan;

- 7) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan penyehatan lingkungan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Surveilans dan Imunisasi**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 3) Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 6) Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Matra dan Kesehatan Jiwa**

1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
3. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
4. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;

6. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Tugas

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian program di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 2) Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 3) Penyelenggaraan kebijakan program di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi program pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi program pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- **Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional**

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan dan pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- 2) Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman teknis dan standar pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan primer dan tradisional yang dilakukan pemerintah maupun swasta;
- 4) Melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan primer dan tradisional;
- 5) Melaksanakan fasilitasi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi program pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi, institusi, pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat tentang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan**

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan pelayanan kesehatan rujukan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan standar pelayanan kesehatan rujukan tingkat kabupaten;
- 3) Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
- 4) Menyiapkan bahan pertimbangan rekomendasi perijinan rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjangnya;
- 5) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan rujukan;
- 6) Melaksanakan fasilitasi peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan;
- 8) Menyiapkan bahan evaluasi program pelayanan kesehatan rujukan;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan**

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan dan kebijakan teknis operasional upaya peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi;
- 2) Menyiapkan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur tetap pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi tingkat kabupaten;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan, menjabarkan dan sosialisasi standar pelayanan dan pengelolaan peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi tingkat kabupaten;
- 4) Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian penerapan kebijakan, peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi;
- 5) Melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi;
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

a) Tugas

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan..

b) Fungsi

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

- **Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta alat kesehatan;
- 4) Melaksanakan pengendalian penyediaan obat, penggunaan obat generik dan perbekalan kesehatan bagi puskesmas dan jaringannya;
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap obat, makanan dan minuman serta perbekalan kesehatan lainnya;
- 6) Melaksanakan pengambilan sampel/ccontoh sediaan farmasi, makanan dan minuman di lapangan dan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan pengelolaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada sarana pelayanan kefarmasian;
- 8) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan;
- 9) Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta alat kesehatan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan sarana dan prasarana kesehatan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;
- 4) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan verifikasi atas aplikasi aspak yang telah dilakukan oleh UPT;
- 5) Memberikan rekomendasi registrasi dan perizinan sarana kesehatan;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- 7) Monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana kesehatan;

- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan meliputi: pelatihan, pembinaan, pemantauan serta mengimplementasikan analisis kebutuhan pelatihan;
- 4) Memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia kesehatan yang berprestasi di bidang kesehatan;
- 5) Memberikan rekomendasi registrasi dan perizinan tenaga kesehatan;
- 6) Menyiapkan dan menyusun laporan sumber daya manusia kesehatan termasuk laporan aplikasi sdmk;
- 7) Monitoring dan evaluasi program sumber daya manusia kesehatan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD

a) Tugas

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

b) Fungsi

UPTD mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi teknis operasional dan fungsional.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya manusia aparatur serta sarana dan prasarana kerja berupa aset bergerak maupun aset tak bergerak.

Sumber daya manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka per 31 Desember 2019 berjumlah 428 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah, kualifikasi pendidikan, pangkat, dan golongan pegawai Dinas Kesehatan yaitu :

Tabel 2.1
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Pangkat/Golongan Pegawai
pada Dinas Kesehatan

| PENDIDIKAN | GOLONGAN | | | | JUMLAH |
|---------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| | I | II | III | IV | |
| SD | 1 | | | | 1 |
| SLTP | | 1 | | | 1 |
| SLTA | | 15 | 31 | | 46 |
| DI | | 1 | 16 | | 17 |
| DIPLOMA | | 91 | 175 | | 226 |
| S1/ DIV | | | 106 | 6 | 112 |
| S2 | | | 17 | 7 | 24 |
| JUMLAH | 1 | 108 | 345 | 13 | 467 |

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

| No. | Sarana Prasarana | Jumlah (Unit) | Kondisi | | |
|-----|------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | Baik (Unit) | Rusak (Unit) | Rusak Berat (Unit) |
| 1 | Gedung Kantor | 312 | 283 | 28 | 1 |
| 2 | Kendaraan Roda 4 | 38 | 32 | 3 | 3 |
| 3 | Kendaraan Roda 2 | 196 | 188 | 4 | 4 |
| 4 | Kendaraan Roda 3 | 0 | | | |
| 5 | Personal Komputer (PC) | 133 | 125 | 6 | 2 |
| 6 | Notebook/Laptop | 86 | 80 | 4 | 2 |
| 7 | Kamera | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Printer | 116 | 115 | 1 | 0 |
| 9 | LCD Proyektor | 17 | 16 | 0 | 1 |
| 10 | Mesin Tik | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | Lain-lain Sarana & Prasarana | | | | |

Tabel 2.3
Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka masing-masing
Sekretariat/Bidang Tahun 2019

| No | Sekretariat/Bidang | Jumlah Pegawai |
|----|---|----------------|
| 1 | Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang | 6 |
| 2 | Sekretariat | 23 |
| 3 | Bidang P2PL | 16 |
| 4 | Bidang Kesehatan Masyarakat | 9 |
| 5 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | 8 |
| 6 | Bidang Pelayanan Kesehatan | 10 |

Tabel 2.4
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019

| No | Jenis Tenaga | 2018 | |
|----|----------------------|--------|-------|
| | | Jumlah | Rasio |
| 1 | Dokter Spesialis | 2 | 0.6 |
| 2 | Dokter Umum | 44 | 14.1 |
| 3 | Dokter Gigi | 15 | 4.8 |
| 4 | Perawat | 242 | 77.4 |
| 5 | Perawat Gigi | 18 | 5.8 |
| 6 | Bidan | 187 | 59.8 |
| 7 | Farmasi | 17 | 5.4 |
| 8 | Apoteker | 8 | 2.6 |
| 9 | Gizi | 23 | 7.4 |
| 10 | Sanitarian | 14 | 4.5 |
| 11 | Terapi Fisik | 0 | 0.0 |
| 12 | Teknik Medik | 0 | 0.0 |
| 13 | Kesehatan Masyarakat | 23 | 7.4 |

Tabel 2.5
Data Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Menurut Pendidikan Tahun 2019

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|----|--------------------|----------------|
| 1 | S2 | 24 |
| 2 | S1 | 114 |
| 3 | DIII/DIV | 226 |
| 4 | DII | 17 |
| 5 | SLTA | 46 |
| 6 | SLTP | 1 |
| 7 | SD | 1 |
| | Jumlah | 429 |

Tabel 2.6
Data Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Menurut Golongan Tahun 2018

| No | Golongan | Jumlah Pegawai |
|----|---------------|----------------|
| 1 | Golongan IV | 13 |
| 2 | Golongan III | 345 |
| 3 | Golongan II | 108 |
| 4 | Golongan I | 1 |
| 5 | Kontrak | 618 |
| | Jumlah | 1085 |

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.7
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kesehatan

| No | Kecamatan | Jumlah Seluruh Puskesmas | | | | Jumlah Rumah Sakit | | | | Unit Pelayanan Kesehatan | | Jumlah Posyandu | | | | | Hotel | | Sarana Air Minum | Jumlah Penyelenggara Sarana Air Minum | |
|----|--------------|--------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------|---------|---------|--------|---------|-------------|------------------|---------------------------------------|----|
| | | Peraawatan | Non Rawat Inap | Keliling | Pustu | RS Khusus Pemerintah | RS Khusus Swasta | RS Umum Pemerintah | RS Umum Swasta | Swasta | Pemerintah | Pratama | Madya | Purnama | Mandiri | Jumlah | Bintang | Non Bintang | | | |
| 1 | Mendo Barat | Petalang | | 2 | 4 | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 1 | 0 | 7770 | 21 | |
| 2 | Barat | Penang | | 2 | 2 | | | | | | | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1481 | 3 | |
| 3 | Merawang | | Batursa | 1 | 2 | | | RSUP Kep.Babel | | 1 | | 0 | 0 | 19 | 4 | 23 | 0 | 1 | 4779 | 21 | |
| 4 | Puding Besar | Puding Besar | | 1 | 4 | | | RSUD Sjafrie Rachman | | | | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1963 | 11 | |
| 5 | Sungailiat | | Sungailiat | 1 | 1 | RSJ Prov. Kep Babel | RSUD Depati Bahrin | RS Medika Stania, RS Arsan i | | 9 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1960 | 22 | |
| 6 | | | Kenganga | 1 | 3 | | | | | 2 | | 6 | | 9 | 1 | 1 | 17 | 1 | 9 | 4453 | 34 |
| 7 | | | Sinar Baru | 1 | 2 | | | | | | 4 | | 0 | | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1650 | 9 |
| 8 | Pemali | | Pemali | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | 4430 | 36 | | |
| 9 | Bakam | Bakam | | 2 | 4 | | | | | 1 | | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | 1481 | 13 | |
| 10 | Belinyu | Belinyu | | 2 | 4 | | | RSUD DR.Eko Maulana Ali | | 2 | | 3 | 8 | 10 | 6 | 27 | 2 | 4 | 6998 | 41 | |
| 11 | | | Gunung Mud a | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 2286 | 6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|----|----|------|------|------|--|----|---|----|----|----|----|-----|---|----|------|-----|--|
| 12 | Riau Silip | | | 2 | 6 | | | | | 1 | | 1 | 0 | 3 | 21 | 25 | 0 | 0 | 5231 | 12 | |
| | | | | 17 | 35 | 1 RS | 0 RS | 4 RS | | 16 | 2 | 16 | 40 | 77 | 90 | 223 | 6 | 18 | 4442 | 229 | |

Tabel TC.2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinkes
Kabupaten Bangka

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|-------|-------|-----|----|------------------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Tersedianya Produk Regulasi Bidang Kesehatan | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | terselenggaranya master sistem informasi kesehatan dan manajemen kesehatan perencanaan dan monev | | | | 65 | 70 | 83 | | | 100 | 75 | 41,67 | | | | | | | |
| | Persentase lingkungan sehat | | | | 75 | 78 | 87,5 | | | 72,92 | 85,08 | 86,41 | | | | | | | |
| | persentase penemuan dan penanganan penyakit menular | | | | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| | persentase penemuan dan penanganan penyakit tidak menular | | | | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|--------------|---------------|-------------|------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | persentase penemuan dan penanganan penyakit endemik/epidemi k dan kasus zoonosis | | | | 80 | 85 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| | persentase penemuan dan penanganan penyakit IMS, HIV/AIDS | | | | 80 | 85 | 100 | | | 64 | 100 | 100 | | | | | | |
| | cakupan desa UCI | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| | persentase penanganan penyakit potensial wabah dan kewaspadaan dini | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 80 | | | | | | |
| | Persentase RT ber-PHBS | | | | 85 | 90 | 91 | | | 74,8 | 74,6 | 86,01 | | | | | | |
| | % Posyandu Purnama dan Mandiri | | | | 82 | | | | | 78 | | | | | | | | |
| | Cakupan Desa Siaga aktif | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 92,21 | 92,21 | | | | | | |
| | Umur Harapan Hidup (UHH) | | | | 69 | 69 | 70.55 | | | 69 | 69 | 70,48 | | | | | | |
| | AKI | | | | 110.0000 | 104/100.0000 | 0,89/100.0000 | 81/100.0000 | 0,04 | 107/100.0000 | 188/100.0000 | 0,81/100.0000 | | | | | | |
| | AKB | | | | 6,2/ | 5/10 | 4.4 | 4,65 | | 5,3/1000 | 7,5/100 | 4,36/1000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|----------|----|--|----------------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 10 00 | 00 | | 3 / 1 0 0 0 | | 0 | | | | | | | |
| | Murid SD/MI yang mendapat Pemeriksaan Gigi dan Mulut | | | | 10 0 | | | | | 100 | | | | | | | |
| | % Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat oleh Nakes atau Tenaga Terlatih /Guru UKS/Dokter Kecil | | | | 78 | | | | | 94,7 | | | | | | | |
| | % Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap | | | | 75 | | | | | 75 | | | | | | | |
| | persentase tenaga kesehatan yang mendapat penghargaan | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | | | |
| | % Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Labkes Sederhana | | | | 10 0 | | | | | 100 | | | | | | | |
| | % Sarkes dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat yang dapat | | | | 37 ,5 | | | | | 37,5 | | | | | | | |

Tabel TC.2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangka

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---|----------|---------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.529.865.000 | 1.725.934.500 | 1.658.508.250 | 1.388.038.246 | 1.661.719.203 | 1.570.587.864 | 90,73 % | 96,28 % | 94,70 % | 1.638.102.583 | 93,90% |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 2.588.854.000 | 726.345.000 | 307.605.000 | 2.360.329.900 | 660.927.000 | 297.794.250 | 91,17 % | 90,99 % | 96,81 % | 1.207.601.333 | 92,99% |
| PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 52.600.000 | 7.400.000 | 103.950.000 | 52.454.000 | 7.400.000 | 102.250.000 | 99,72 % | 100,00 % | 98,36 % | 54.650.000 | 99,36% |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 216.295.000 | | 203.701.800 | 175.389.037 | | 195.871.070 | 81,09 % | | 96,16 % | 139.998.933 | 88,62% |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.718.000 | 15.000.000 | 13.875.000 | 98,12 % | 100,00 % | 92,50 % | 15.000.000 | 96,87% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| KINERJA DAN KEUANGAN | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH | 20.000.000 | | 10.000.000 | 19.660.000 | | 9.940.000 | 98,30 % | | 99,40 % | 10.000.000 | 98,85% |
| PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN | 8.735.845.800 | 3.091.696.000 | 3.985.022.000 | 8.672.607.605 | 3.101.873.816 | 3.971.476.520 | 99,28 % | 100,33 % | 99,66 % | 5.270.854.600 | 99,76% |
| PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 29.548.215.950 | 28.312.428.105 | 35.498.948.450 | 25.549.373.095 | 26.267.607.337 | 34.187.036.045 | 86,47 % | 92,78 % | 96,30 % | 31.119.864.168 | 91,85% |
| PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | 13.265.000 | 11.370.000 | 11.370.000 | 12.865.000 | 11.270.000 | 11.342.400 | 96,98 % | 99,12 % | 99,76 % | 12.001.667 | 98,62% |
| PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 26.530.000 | 79.884.000 | 94.111.000 | 25.730.000 | 79.450.750 | 93.659.750 | 96,98 % | 99,46 % | 99,52 % | 66.841.667 | 98,65% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---|---------|---------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT | 148.605.000 | 80.152.500 | 79.702.000 | 147.966.300 | 79.790.500 | 79.272.000 | 99,57 % | 99,55 % | 99,46 % | 102.819.833 | 99,53% |
| PROGRAM PENGEMBA NGAN LINGKUN GAN SEHAT | 364.328.500 | 165.743.000 | 328.206.000 | 300.928.200 | 150.884.000 | 311.465.630 | 82,60 % | 91,03 % | 94,90 % | 286.092.500 | 89,51% |
| PROGRAM PENCEGAH AN DAN PENANGGU LANGAN PENYAKIT MENULAR | 707.214.000 | 411.915.500 | 335.350.500 | 631.525.365 | 378.780.500 | 303.273.800 | 89,30 % | 91,96 % | 90,43 % | 484.826.667 | 90,56% |
| PROGRAM STANDARIS ASI PELAYANA N KESEHATA N | 1.059.323.000 | 1.014.263.000 | 345.371.250 | 778.401.185 | 968.809.678 | 304.254.800 | 73,48 % | 95,52 % | 88,09 % | 806.319.083 | 85,70% |
| PROGRAM PENGADAA N, PENINGKAT AN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARAN A PUSKESMA S/PUSKESM AS | 2.689.917.500 | 8.002.515.000 | 7.942.650.000 | 2.059.372.735 | 7.926.303.900 | 7.685.265.000 | 76,56 % | 99,05 % | 96,76 % | 6.211.694.167 | 90,79% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---|---------|---------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| PEMBANTU DAN JARINGANN YA | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGADAA N, PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARAN A RUMAH SAKIT/RUM AH SAKIT JIWA/RUMA H SAKIT PARU-PARU/RUM AH SAKIT MATA | 3.134.400.000 | 16.965.633.000 | 10.093.557.400 | 2.905.306.600 | 14.497.806.214 | 7.933.380.312 | 92,69 % | 85,45 % | 78,60 % | 10.064.530.133 | 85,58% |
| PROGRAM KEMITRAAN PENINGKAT AN PELAYANA N KESEHATA N | 10.853.202.550 | | | 6.997.696.529 | | | 64,48 % | | | 3.617.734.183 | 64,48% |
| PROGRAM PENINGKAT AN PELAYANA N KESEHATA N ANAK BALITA | 45.425.000 | 13.390.000 | 62.665.000 | 44.955.000 | 13.050.000 | 53.138.930 | 98,97 % | 97,46 % | 84,80 % | 40.493.333 | 93,74% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke- | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA | 63.937.600 | 18.002.000 | 33.995.000 | 56.418.800 | 17.311.000 | 27.485.000 | 88,24 % | 96,16 % | 80,85 % | 38.644.867 | 88,42% |
| PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK | 1.165.264.000 | 1.390.621.500 | 2.218.797.500 | 210.975.000 | 592.507.410 | 1.273.117.800 | 18,11 % | 42,61 % | 57,38 % | 1.591.561.000 | 39,36% |
| PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI | 15.738.000 | 10.660.000 | 10.654.000 | 14.393.000 | 10.660.000 | 10.594.000 | 91,45 % | 100,00 % | 99,44 % | 12.350.667 | 96,96% |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN UMUM KESEHATAN | | 10.524.741.121 | 16.152.882.795 | | 10.666.070.223 | 12.003.346.773 | | 101,34 % | 74,31 % | 8.892.541.305 | 87,83% |
| JUMLAH | 62.993.825.900 | 72.567.694.226 | 79.492.047.945 | 52.419.103.597 | 67.107.221.532 | 70.438.426.944 | 83,21 % | 92,48 % | 88,61 % | 71.684.522.690 | 89,63% |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

a. Derajat Kesehatan

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu merupakan indikator yang sensitif untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan di satu wilayah. Situasi AKI dan AKB yang fluktuatif selama 5 tahun, meskipun pada beberapa tahun terakhir kedua indikator tersebut mengalami penurunan yang signifikan dan jauh di bawah target nasional tetapi merupakan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dan perlu upaya untuk tetap menurunkan AKI dan AKB hingga mencapai zero kematian.

Angka kesakitan juga merupakan tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka. Meskipun semua penemuan pada kasus penyakit menular dapat ditangani, akan tetapi penularan pada penyakit menular utama yaitu HIV/AIDS, TBC, Demam Berdarah dan Hepatitis masih merupakan masalah kesehatan utama yang dihadapi Kabupaten Bangka. Potensi kejadian Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan potensial wabah juga harus diwaspadai meskipun cakupan imunisasi sudah mencapai target. Di sisi lain, perkembangan penyakit tidak menular yaitu Hipertensi, Diabetes Mellitus, Kanker, Jantung, Jiwa juga merupakan masalah kesehatan yang menjadi tantangan untuk dapat dikendalikan.

Beban ganda penyakit menular dan tidak menular berpotensi sebagai penyebab utama kematian karena adanya determinan penyakit yang berbeda di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.

Skrining status gizi pada balita juga menunjukkan masalah gizi "Stunting"/pendek menjadi masalah yang perlu segera diintervensi karena status gizi kurang pada masa balita sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

b. Perilaku Kesehatan

Perilaku kesehatan merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi status kesehatan individu, keluarga dan masyarakat. Perilaku dalam mempertahankan kesehatan individu yaitu: mengkonsumsi sayur dan buah, melakukan aktifitas fisik, tidak merokok, tidak

mengonsumsi alkohol, tidak menggunakan napza, dan tidak buang air besar besar sembarangan. Konsumsi makanan yang tidak seimbang dan cenderung berlebihan juga merupakan perilaku yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit metabolisme. Penggunaan bahan kimia yang dilarang sebagai bahan tambahan makanan juga memberikan ancaman yang serius terhadap masalah kesehatan.

c. Kualitas Kesehatan Lingkungan

Kualitas kesehatan lingkungan merupakan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka. Akses penggunaan jamban di Kabupaten Bangka sudah mencapai target akan tetapi jumlah desa dengan status Open Defecation Free (bebas dari Buang Air Besar Sembarangan) masih belum mencapai target. Pencapaian desa ODF merupakan tantangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat.

2.4.2. Peluang

a. Perkembangan Teknologi dan Informasi

Kemajuan teknologi dan informasi bidang kesehatan memberikan peluang yang positif dalam mempercepat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan serta kemajuan teknologi dalam dunia kedokteran memberikan peluang dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

d. Kerjasama dan Kemitraan

Masalah kesehatan merupakan masalah nasional yang harus diselesaikan secara multisektor. Kontribusi nyata dari sektor swasta, sektor publik lain serta masyarakat merupakan peluang dalam upaya untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat.

e. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada saat ini merupakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah termasuk sektor kesehatan. Peluang ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang bersih yang berwawasan

kesehatan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini juga memberikan peluang pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam mempercepat akses pelayanan kesehatan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

f. Implementasi PPK BLUD

Penetapan dan implementasi pada seluruh puskesmas dan rumah sakit pemerintah di Kabupaten Bangka sebagai PPK BLUD merupakan peluang bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengembangkan layanan puskesmas dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan puskesmas.

g. Inovasi bidang kesehatan

Respon terhadap masalah kesehatan mampu mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam menciptakan inovasi bidang kesehatan. Beberapa inovasi bidang kesehatan telah berhasil mendapatkan penghargaan di tingkat nasional, hal ini merupakan peluang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada pelanggan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan kesehatan Kabupaten Bangka yang dihadapi saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (Bidang Kesehatan Masyarakat)

AKI dan AKB yang walaupun sudah berada di bawah target nasional tapi tetap menjadi masalah kesehatan yang harus diprioritaskan karena kasus kematian pada ibu dan bayi sangat fluktuatif. Kualitas pelayanan kesehatan masa kehamilan dan neonatus perlu ditingkatkan karena belum mencapai target SPM, deteksi tumbuh kembang anak pada bayi dan balita juga belum mencapai target. Masalah ini potensial untuk menyumbang kasus kematian pada bayi, ibu hamil dan ibu melahirkan. Terjadi penurunan angka kematian ibu pada tahun terakhir renstra dari 9 kasus pada tahun 2018 menjadi 4 kasus pada tahun 2019 perlu menjadi prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

Kasus gizi buruk di kabupaten Bangka memang sangat rendah dengan prevalensi 0,04 %, akan tetapi hal yang perlu diwaspadai adalah kasus gizi kurang, prevalensi stunting relatif tinggi dengan 10 desa yaitu desa Neknang, Maras Senang, Riding Panjang, Saing, Mendo, Cengkong Abang, Air Duren, Penagan, Kota Kapur dan Rukam yang menjadi lokus intervensi stunting dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pemantauan status gizi balita belum mencapai target, jumlah ibu hamil KEK masih bervariasi di tingkat puskesmas, pemantauan kasus anemia gizi besi pada remaja putri juga menjadi masalah, walaupun pemberian tablet Fe pada tahun akhir renstra mencapai lebih dari 80%, serta pemberian ASI Eksklusif masih rendah.

Pelayanan Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat merupakan tantangan masalah kesehatan. Perilaku Merokok mencapai angka ... % merupakan salah faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular

2. Permasalahan Penyelenggaraan Upaya Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Penyehatan Lingkungan

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan upaya Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular yaitu beban ganda penyakit yang ditemukan dan ditangani di Kabupaten Bangka. Penyakit menular masih banyak ditemukan dengan frekuensi yang fluktuatif dan penyakit tidak menular mulai menunjukkan trend kenaikan. Salah satu penyakit menular yang mengalami peningkatan kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) dari 52 pada Tahun 2017 menjadi 86 pada Tahun 2018. Semua kasus sudah dilakukan penanganan sesuai dengan pedoman program DBD yaitu Penyelidikan Epidemiologi (PE), Abatisasi dan Fogging jika diperlukan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih menjadi pemicu peningkatan kepadatan nyamuk DBD. Masih terdapat tempat perindukan nyamuk aedes aegypti di sekitar rumah penduduk ditambah lagi dengan budaya masyarakat yaitu menampung air hujan dalam bak-bak besar berukuran 2000 – 5000 liter dan tidak melakukan intervensi apapun terhadap jentik yang tumbuh pada bak – bak raksasa tersebut. Program penemuan penyakit Tuberculosis juga belum mencapai target namun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada program pengendalian penyakit tidak menular masih terdapat indikator yang belum mencapai target yaitu skrining usia produktif yaitu pada angka 77,85%, penemuan dan pengobatan penderita hipertensi 96,1% dan penemuan & pengobatan penderita DM 90,60%, namun jika dibandingkan dengan tahun 2017 banyak mengalami peningkatan yaitu 24,76% untuk skrining usia produktif, 55,03% untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan 75,81% untuk pelayanan penderita DM.

Pada program Penyehatan Lingkungan, pada tahun 2018 terdapat penambahan desa ODF sebanyak 7 desa dan 1 (satu) kecamatan ODF yaitu Merawang. Terjadi peningkatan cakupan penggunaan Jamban dan Air Bersih yaitu 93,87% untuk jamban dan 89,6% untuk cakupan air bersih.

3. Permasalahan Bidang Pelayanan Kesehatan

Permasalahan yang masih menjadi tantangan di Bidang Pelayanan Kesehatan diantaranya: peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan terkait kenaikan status akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka, Puskesmas yang sesuai dengan standar baru 60 % dari 12 puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka, Penguatan manajemen Puskesmas yang perlu

ditingkatkan, pengembangan kesehatan tradisional (asuhan mandiri yg terbentuk baru 28 kelompok dari target 81 kelompok), pengembangan sistem rujukan dan telemedicine, peningkatan mutu pelayanan poned (dsri 4 pkm yang dijadikan pkm poned, standar tenaga, prasarana dan peralatan belum terpenuhi), peningkatan pembinaan fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, Pengembangan puskesmas ramah anak dan lansia, Peningkatan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas serta pengembangan program kesehatan gigi dan mulut, di mana pelaksanaan program ini baru menjangkau 50 persen dari sekolah dasar yang menjadi sasaran. Untuk Universal coverage di Kabupaten Bangka juga masih belum mencapai target nasional sebesar 95%.

Indeks Keluarga Sehat yang menjadi Indikator Kesehatan Keluarga dalam satu wilayah yang pelaksanaannya melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) masih berada pada angka 0,44.

4. Permasalahan Bidang Sumber Daya Kesehatan

Permasalahan yang masih ada di Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) antara lain; Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang belum sesuai standar baik dalam hal kelengkapan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), Kelengkapan Sarana dan Prasarana serta Alat Kesehatan yang menjadi tolak ukur kinerja bidang ini.

Dalam program SDMK, indikator yang menjadi permasalahan adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di setiap fasyankes. Sebagian puskesmas belum sesuai standar minimal PMK 75 Tahun 2014 yaitu 5 puskesmas dari 12 puskesmas (58,3%). Kendala ini disebabkan antara lain karena tenaga kesehatan yang mengundurkan diri, pindah/ mutasi, pindah domisili. Sedangkan berdasarkan jumlah, jumlah tenaga kesehatan di puskesmas telah melebihi standar sesuai kategori masing-masing puskesmas.

Untuk program sarana dan prasarana, dari 14 fasyankes yang ada di bawah Dinas Kesehatan Kab. Bangka hampir seluruhnya baru 50% yang memenuhi standar (Tahun 2018), sementara standar kelengkapan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi tiap fasyankes sesuai PMK 75 Tahun 2014 adalah 50% untuk Sarana dan 10 % untuk Prasarana.

Dalam program Farmasi, ketersediaan alat kesehatan di fasyankes menunjukkan bahwa 7 fasyankes dari 14 fasyankes (50%) telah memenuhi indikator standar kelengkapan/kepemilikan alat kesehatannya (diatas 40%), sementara 7

fasyankes lainnya belum sesuai standar peralatan kesehatan sebagaimana PMK 75 Tahun 2014.

Sementara dari program Obat dan perbekalan farmasi habis pakai, ketersediaan di fasyankes sudah memenuhi standar (100%) obat-obat yang tertera dalam Formularium Nasional (baik obat generik maupun obat generik bermerk). Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan obat-obat fasyankes sendiri tiap tahunnya meningkat 10-22%.

Pemenuhan fasyankes terhadap 4 indikator Bidang SDK diatas adalah 7 fasyankes memenuhi 3 dari 4 indikator yang diharapkan (Memenuhi Syarat), sedangkan 7 fasyankes lainnya hanya memenuhi 2 dari 4 indikator yang diharapkan (Tidak Memenuhi Syarat).

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka sehingga langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Visi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah "BANGKA SETARA (Bangka Sejahtera dan Mulia)", sedangkan Misi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih;
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
- 3) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah;
- 4) Mewujudkan Pariwisata yang Mendunia;
- 5) Mewujudkan Perekonomian Dunia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan arahan tentang peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan misi kedua yaitu "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas". Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan derajat kesehatan yang optimal.

Pada Misi kedua tersebut terlihat jelas peran Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercapai derajat kesehatan yang setinggi-setingginya dapat terwujud.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong” melalui 7 misi pembangunan. Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas” selaras dengan pernyataan misi pembangunan nasional keempat yaitu “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera” serta hal ini merupakan penjabaran dari agenda Nawa Cita ke-5 yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka ditinjau dari gambaran pelayanan Dinkes, telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, sasaran jangka menengah pada Renstra Kemenkes dan Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta implikasi RTRW bagi pelayan SKPD dalam pembangunan kesehatan dan isu yang berkembang saat ini, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor kesehatan yang menjadi perhatian Dinkes Kabupaten Bangka dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka ditinjau dari gambaran pelayanan Dinkes, telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, sasaran jangka menengah pada Renstra Kemenkes dan Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta implikasi RTRW bagi pelayan SKPD dalam pembangunan kesehatan dan isu yang berkembang saat ini, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor kesehatan yang menjadi

perhatian Dinkes Kabupaten Bangka dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka.

Isu strategis yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang sedang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil masih perlu ditingkatkan kualitasnya karena kasus kematian ibu dan kematian bayi (AKI/AKB) masih ditemukan setiap tahun dan fluktuatif.
2. Mutu pelayanan kesehatan masih perlu peningkatan karena tuntutan pelayanan publik akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan belum adanya puskesmas yang terakreditasi paripurna di Kabupaten Bangka.
3. Beban ganda penyakit (*Double Burden Diseases*), penyakit menular masih terus bermunculan dan perlu dilakukan pengendalian seiring dengan peningkatan kejadian kasus penyakit.
4. Indeks Keluarga Sehat yang masih rendah.
5. Kejadian gizi buruk cukup rendah dan masih di bawah target nasional, tetapi prevalensi stunting cukup tinggi dan menjadi lokus intervensi bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta rendahnya cakupan ASI Eksklusif dan pemantauan status gizi pada balita.
6. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan terkait pemanfaatan sistem informasi kesehatan.
7. Kualitas kesehatan lingkungan yang belum optimal, walaupun akses penggunaan jamban relatif tinggi di atas 80% akan tetapi desa dengan status ODF (Odd Defecation Free) masih rendah.
8. Masih ada fasilitas pelayanan kesehatan dengan sumber daya kesehatan yang tidak sesuai standar.
9. Belum terwujudnya *universal coverage*
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang belum mencapai
11. Perencanaan dan monitoring evaluasi bidang kesehatan melalui beberapa mekanisme sehingga belum efektif

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Rumus | Target Indikator Sasaran | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya status kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | | | | |
| | | Angka Kematian Ibu | Jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas selama 1 tahun di bagi Jumlah lahir hidup selama 1 tahun x 100.000 KH | 61,00 | 60,00 | 58,00 |
| | | AKB | Jumlah kematian bayi selama 1 tahun di bagi Jumlah lahir hidup selama 1 tahun x 1000 KH | 3,2 | 3,15 | 3,1 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Rumus | Target Indikator Sasaran | | |
|--------|--|---|--|--------------------------|----------|-----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk | Jumlah Kasus Gizi buruk balita berdasarkan BB/TB di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi jumlah seluruh balita pada periode tertentu di suatu wilayah dikali 100 | 0,02 | 0,15 | 0,15 |
| | | Angka Kesakitan | Indeks Penyakit Menular dan Indeks Penyakit tidak menular dalam kurun waktu tertentu dibagi 2 | 0,4 | 0,38 | 0,35 |
| | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kategori hasil survey IKM sesuai standar | A(88.45) | A(88.50) | A(88.55) |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Kesehatan | Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan | Nilai SAKIP | B(74.35) | B(74.40) | BB(74.45) |

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi: “ BANGKA SETARA (Bangka Sejahtera dan Mulia) ” | | | |
|---|---|--|---|
| Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat | 1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat | 1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai siklus kehidupan sesuai standar yang berkualitas. | 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan ibu terstandar |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita sesuai standar |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan pada usila lanjut |
| | | | 4. Meningkatkan akses dan pelayanan gizi kesehatan masyarakat |
| | | | 5. Memperkuat upaya kesehatan bersumber daya masyarakat |
| | | 2. Peningkatan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit serta penyehatan lingkungan | 6. Meningkatkan Upaya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular |
| | | 7. Melakukan pengendalian terhadap faktor Risiko Penyakit tidak menular | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | 8. Meningkatkan upaya sanitasi total berbasis masyarakat |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Yang Akuntabel | 2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | 3. Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan yang Bermutu | 9. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah 10. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi sumber daya kesehatan 11. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan penataan sistem rujukan 12. Meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan 13. Memperkuat sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat |
| | 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinkes | 4. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan | 14. Meningkatkan kapasitas sumber daya penunjang 15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan |
| | | 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah | |

Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun 2020 | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--|---|---|--|------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|---|----------------|
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| | | | | | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | | | Usia Harapan Hidup | 70.58 | 70.62 | | 70.64 | | 70.65 | | | |
| Sasaran Strategis 1 | Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat | | Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) | 61.99 | 61.00 | | 60.00 | - | 59.00 | - | | |
| | | | Angka Kematian bayi (per 1.000 KH) | 3.25 | 3.2 | | 3.15 | | 3.1 | | | |
| | | | Prevalensi Gizi Buruk | 0.02 | 0.02 | | 0,015 | | 0,015 | | | |
| | | | Angka Kesakitan (Morbiditas) | | 0.4 | | 0.38 | | 0.35 | | | |
| Sasaran Program 1.1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan reproduksi | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indeks Keluarga Sehat Upaya Kesehatan Ibu | | 0.44 | 3,058,005,400.00 | 0.45 | 3,363,805,940.00 | 0.47 | 3,700,186,534.00 | | 10,121,997,874 |
| Sasaran Program 1.2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Balita | | Indeks Keluarga Sehat Upaya Kesehatan Balita | | 0.44 | | 0.45 | | 0.47 | | | |
| Sasaran Program 1.3 | Meningkatnya Upaya Pencegahan & Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan | | Indeks Keluarga Sehat Upaya P2P dan PL | | 0.48 | | 0.50 | | 0.56 | | | |
| Kegiatan 1 | | Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 100% | 3,058,005,400.00 | 100% | 3,363,805,940.00 | 100% | 3,700,186,534.00 | | 10,121,997,874 |
| Sasaran Kegiatan 1.1 | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga | | Cakupan bulin yang mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar | 91,65% | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Status gizi kurang pada ibu hamil | | 10% | | 9% | | 8% | | | |
| | | | Cakupan warga negara diatas 60th yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut | 93,55% | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| Sasaran Kegiatan 1.2 | Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Balita dan Remaja | | Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 97,17% | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | | Status gizi kurang pada balita | | 10% | | 9% | | 8% | | | |
| | | | Cakupan anak usia sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| Sasaran Kegiatan 1.3 | Terselenggaranya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular, Survelans, dan Imunisasi | | Indeks penyakit menular | | 0.08 | | 0.08 | | 0.07 | | | |
| | | | Cakupan desa UCI | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | | Cakupan pelayanan SKDR | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| Sasaran Kegiatan 1.4 | Terselenggaranya Pencegahaan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Matra, dan Kesehatan Jiwa | | Indeks penyakit tidak menular | | 0.83 | | 0.80 | | 0.77 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--|--|
| | | | Cakupan ODGI berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan mata | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| Sasaran Kegiatan 1.5 | Terselenggaranya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | | Cakupan desa/kelurahan STBM | | 25% | | 27% | | 30% | | | |
| Sasaran Sub Kegiatan 1.1 | Terselenggaranya Kesehatan Keluarga | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 95,13% | 100% | 131,113,000.00 | 100% | 144,224,300.00 | 100% | 158,646,730.00 | | |
| | | | Persentase Pelayanan Komplikasi Maternal | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Persentase Penanganan Ibu Hamil Resiko Tinggi | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Cakupan Ibu Hamil KEK | | 15% | | 14% | - | 13% | - | | |
| | | | Cakupan Ibu Hamil KEK Mendapatkan PMT | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase Ibu Bersalin di Faskes | | 100% | 1,255,300,000.00 | 100% | 1,380,830,000.00 | 100% | 1,518,913,000.00 | | |
| | | | Cakupan Ibu Bersalin dengan inisiasi menyusui dini | | 60% | | 61% | - | 62% | - | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar | 101,10% | 100% | 146,535,000.00 | 100% | 161,188,500.00 | 100% | 177,307,350.00 | | |
| | | | Jumlah Bayi yang Mendapatkan Skrining Hipotroid Kongenital | | 987 Bayi | | 1000 Bayi | - | 1050 | - | | |
| Sasaran Sub Kegiatan 1.2 | Terselenggaranya Upaya Kesehatan Balita dan Remaja | Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan balita | Persentase balita yang ditimbang setiap bulan | | 70% | 737,125,000.00 | 72% | 810,837,500.00 | 73% | 891,921,250.00 | | |
| | | | Cakupan balita yang naik berat badannya | | 80% | | 82% | - | 83% | - | | |
| | | | Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Cakupan balita kurus mendapatkan PMT | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Bak stunting | | | | 1 paket | | 1 paket | | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase Anak yang Sangat Kurus Di sekolah | | 9% | 47,480,000.00 | 8.5% | 52,228,000.00 | 8% | 57,450,800.00 | | |
| | | | Jumlah anak SD yang mendapatkan pelayanan kesehatan gimul | | 4000 Anak | | 4250 Anak | - | 4500 Anak | - | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Persentase wanita usia produktif yang Mendapatkan Pelayanan IVA | | 20% | 30,184,800.00 | 50% | 33,203,280.00 | 80% | 36,523,608.00 | | |
| | | | Cakupan KB Aktif | | 75% | | 77% | - | 78% | - | | |
| | | | Cakupan Usia 15 - 59 Tahun yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar | 68,69% | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Lanjut | Persentase posyandu lansia aktif | | 100% | 36,250,850.00 | 100% | 39,875,935.00 | 100% | 43,863,528.50 | | |
| | | | Cakupan Skrining Kesehatan Lansia | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis | Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkolosis sesuai standar | 100,36% | 100% | 36,535,000.00 | 100% | 40,188,500.00 | 100% | 44,207,350.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---------|------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|--|---------------|
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | Cakupan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar | 107,24% | 100% | 127,645,000.00 | 100% | 140,409,500.00 | 100% | 154,450,450.00 | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga | Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar | | 100% | 27,268,000.00 | 100% | 29,994,800.00 | 100% | 32,994,280.00 | | |
| | | | Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olah Raga | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Cakupan Desa ODF | | 60% | 166,211,750.00 | 63% | 182,832,925.00 | 65% | 201,116,217.50 | | |
| | | | Cakupan Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Memenuhi Syarat | | 82% | | 85% | - | 87% | - | | |
| | | | Cakupan Penduduk yang Memiliki Akses Jamban | | 93% | | 95% | - | 97% | - | | |
| | | | Cakupan Rumah Tangga yang Mengolah Limbah Domestik | | 65% | | 68% | - | 70% | - | | |
| | | | Cakupan Rumah Tangga yang Mengelolah Sampah Rumah Tangga | | 65% | | 68% | - | 70% | - | | |
| | | | Cakupan Rumah Tangga yang Melakukan Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga | | 65% | | 68% | - | 70% | - | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Persentase KLB yang Ditangani | | 100% | 71,285,000.00 | 100% | 78,413,500.00 | 100% | 86,254,850.00 | | |
| | | Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular (Malaria, DBD, Ispa, Diare, Pneumonia, Kusta, zoonosis, HIV, TB, Hepatitis) | | 100% | 245,072,000.00 | 100% | 269,579,200.00 | 100% | 296,537,120.00 | | |
| | | | Persentase angka bebas jentik | | 93% | | 94% | - | 95% | - | | |
| | | | Cakupan penderita hipertensi > 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Cakupan penderita diabetes militus > 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Cakupan Jamaah Haji yang mendapatkan layanan kesehatan | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Bok Kabupaten (Upaya P2P) | | | | 1 paket | | 1 paket | | | |
| Sasaran Program 1.4 | Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Indeks rumah tangga yang berPHBS | | 0.75 | 1,162,063,000.00 | 0.77 | 1,278,269,300.00 | 0.78 | 1,406,096,230.00 | | 3,846,428,530 |
| Kegiatan 2 | | Kegiatan advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 57,258,000.00 | | 62,983,800.00 | | 69,282,180.00 | | 189,523,980 |
| Sasaran Kegiatan 2.1 | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat | | Cakupan penyelenggaraan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat | | 75% | | 77% | - | 78% | - | | |
| | | Sub kegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat | Cakupan desa dengan ADD kesehatan | | 85% | 57,258,000.00 | 86% | 62,983,800.00 | 87% | 69,282,180.00 | | |
| | | | Bok Kabupaten (Upaya Kesehatan Masyarakat yang terlaksana) | | | | 1 Paket | | 1 Paket | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Kegiatan 3 | | Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota | | | 1,104,805,000.00 | | 1,215,285,500.00 | | 1,336,814,050.00 | | 3,656,904,550 |
| | | | Cakupan bayi diberi ASI eksklusif | | 82% | | 83% | - | 84% | - | |
| | | | Cakupan anggota keluarga yang tidak merokok | | 56% | | 56% | - | 57% | - | |
| | | Sub kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Persentase posyandu lansia aktif | | 70% | 1,104,805,000.00 | 72% | 1,215,285,500.00 | 74% | 1,336,814,050.00 | |
| | | | Persentase desa/Kelurahan siaga aktif | | 80% | | 82% | - | 85% | - | |
| Sasaran Strategis 2 | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | | Indeks kepuasan masyarakat | | 88.45 | | 88.50 | - | 88.55 | - | |
| Sasaran Program 2.1 | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memenuhi standar | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase faskes yang meningkat status akreditasinya | | 100% | 3,486,517,353,625.00 | 100% | 3,835,169,088,987.50 | 100% | 4,218,685,997,886.25 | 11,540,372,440,498.70 |
| Kegiatan 1 | | Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 100% | 57,193,437,720.00 | 100% | 62,912,781,492.00 | 100% | 69,204,059,641.20 | 189,310,278,853.20 |
| Sasaran Kegiatan 1.1 | Terselenggaranya pelayanan kesehatan primer, tradisional dan komunitas sesuai standar | | Status kapitasi berbasis pemenuhan komitmen layanan | | 50% | | 58,33% | - | 66,67% | - | |
| | | | Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan | | 80% | | 85% | - | 90% | - | |
| | | | Capaian penilaian kinerja Puskesmas | | 100% | | 100% | - | 100% | - | |
| | | | Cakupan kelompok asuhan mandiri pemanfaatan toga dan akupresyure | | 100% | | 100% | - | 100% | - | |
| Sasaran Kegiatan 1.2 | Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan yang terstandar | | Cakupan faskes rujukan yang memenuhi standar pelayanan (akreditasi rumah sakit) | | 100% | | 100% | - | 100% | - | |
| | | | Cakupan pelayanan puskesmas PONED yang memenuhi standar | | 100% | | 100% | - | 100% | - | |
| | | | Cakupan faskes yang menjalankan SISRUITE | | 100% | | 100% | - | 100% | - | |
| | | | Persentase ketepatan Respon time pelayanan kegawat daruratan pra RS | | 100% | | 100% | - | 100% | - | |
| Sasaran Kegiatan 1.3 | Terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu | | Compliance Rate (Kepatuhan kepada SOP) | | 100% | | 100% | - | 100% | - | |
| | | | Status akreditasi LABKESDA | | Penuh | | Penuh | - | Penuh | - | |
| | | | Cakupan FKTP yang memenuhi standar (akreditasi puskesmas) | | 100% | | 100% | - | 100% | - | |
| | | Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya | Cakupan puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional dan komplementer | | 100% | 27,180,000.00 | 100% | 29,898,000.00 | 100% | 32,887,800.00 | 89,965,800.00 |
| | | | Presentase puskesmas yang menjalankan perkesmas | | 100% | | 100% | - | 100% | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------|
| | | Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Cakupan kasus kegawatdaruratan pra RS yang ditangani | | 100% | 1,511,362,000.00 | 100% | 1,662,498,200.00 | 100% | 1,828,748,020.00 | | 5,002,608,220.00 |
| | | Sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat | Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan jaminan kesehatan | | 65% | 21,269,102,100.00 | 70% | 23,396,012,310.00 | 75% | 25,735,613,541.00 | | |
| | | Sub kegiatan operasional pelayanan rumah sakit | Jumlah Operasional Pelayanan RS | | 12 bulan | 19,601,968,500.00 | 12 bulan | 21,562,165,350.00 | 12 bulan | 23,718,381,885.00 | | |
| | | Operasional Pelayanan RSUD Eko Maulana Ali | - Jumlah oprasional (APBD) RSUD Eko Maulana Ali | | 12 bulan | 3,800,156,900.00 | 12 bulan | 4,180,172,590.00 | 12 bulan | 4,598,189,849.00 | | |
| | | Operasional Pelayanan RSUD Syafie Rachman | - Jumlah oprasional (APBD) RSUD Syafie Rachman | | 12 bulan | 1,152,182,200.00 | 12 bulan | 1,267,400,420.00 | 12 bulan | 1,394,140,462.00 | | |
| | | Operasional Pelayanan RSUD Depati Bahrin | - Jumlah oprasional (APBD) RSUD Depati Bahrin | | 12 bulan | 14,649,629,400.00 | 12 bulan | 16,114,592,340.00 | 12 bulan | 17,726,051,574.00 | | |
| | | Sub Kegiatan operasional pelayanan Puskesmas | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas (APBD & BOK) | | 12 bulan | 14,192,095,120.00 | 12 bulan | 15,611,304,632.00 | 12 bulan | 17,172,435,095.20 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Kenanga | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Kenanga | | 12 bulan | 1,101,603,500.00 | 12 bulan | 1,211,763,850.00 | 12 bulan | 1,332,940,235.00 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Belinyu | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Belinyu | | 12 bulan | 1,377,960,000.00 | 12 bulan | 1,515,756,000.00 | 12 bulan | 1,667,331,600.00 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Gunung Muda | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Muda | | 12 bulan | 872,380,000.00 | 12 bulan | 959,618,000.00 | 12 bulan | 1,055,579,800.00 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Sungailiat | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Sungailiat | | 12 bulan | 1,067,512,500.00 | 12 bulan | 1,174,263,750.00 | 12 bulan | 1,291,690,125.00 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Baturusa | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Baturusa | | 12 bulan | 1,131,810,000.00 | 12 bulan | 1,244,991,000.00 | 12 bulan | 1,369,490,100.00 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Pemali | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Pemali | | 12 bulan | 1,042,817,500.00 | 12 bulan | 1,147,099,250.00 | 12 bulan | 1,261,809,175.00 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Bakam | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Bakam | | 12 bulan | 1,488,742,120.00 | 12 bulan | 1,637,616,332.00 | 12 bulan | 1,801,377,965.20 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Riausilip | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Riausilip | | 12 bulan | 1,354,454,500.00 | 12 bulan | 1,489,899,950.00 | 12 bulan | 1,638,889,945.00 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Puding Besar | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Puding Besar | | 12 bulan | 1,114,648,500.00 | 12 bulan | 1,226,113,350.00 | 12 bulan | 1,348,724,685.00 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Petaling | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Petaling | | 12 bulan | 1,339,810,000.00 | 12 bulan | 1,473,791,000.00 | 12 bulan | 1,621,170,100.00 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Sinar Baru | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Sinar Baru | | 12 bulan | 922,120,000.00 | 12 bulan | 1,014,332,000.00 | 12 bulan | 1,115,765,200.00 | | |
| | | Operasional pelayanan Puskesmas Penagan | - Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Penagan | | 12 bulan | 1,378,236,500.00 | 12 bulan | 1,516,060,150.00 | 12 bulan | 1,667,666,165.00 | | |
| | | Sub kegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (UPT LABKESDA) | Cakupan sempel yang diperiksa | | 100% | 187,910,000.00 | 100% | 206,701,000.00 | 100% | 227,371,100.00 | | |
| | | | Jumlah Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan | | | | 12 bulan | | 12 bulan | | | |
| | | Sub kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah pendampingan reakreditasi di puskesmas | | 12 PKM | 403,820,000.00 | 12 PKM | 444,202,000.00 | 12 PKM | 488,622,200.00 | | |
| | | | Jumah standarisasi FKTP klinik | | 4 Klinik | | | 8 Klinik | - | 12 Klinik | - | |
| | | | Jumlah supervisi dan pembinaan puskesmas ramah anak | | 12 PKM | | | 12 PKM | - | 12 PKM | - | |
| | | | Jumlah Workshop peningkatan mutu dan standarisasi | | 1 kali | | | 1 kali | - | 1 kali | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di RSUD Depati Bahrin | Status akreditasi RSUD Depati Bahrin | Paripurna | 143,520,000.00 | Paripurna | 157,872,000.00 | Paripurna | 173,659,200.00 | | |
| | | Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di RSUD Eko Maulana Ali | Status akreditasi RSUD Eko Maulana Ali | Utama | 149,300,000.00 | Utama | 164,230,000.00 | Utama | 180,653,000.00 | | |
| | | Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di RSUD Syafrie Rachman | Status akreditasi RSUD Syafrie Rachman | Madya | 111,000,000.00 | Madya | 122,100,000.00 | Madya | 134,310,000.00 | | |
| Kegiatan 4 | | Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 3,429,310,095,905.00 | | 3,772,241,105,495.50 | | 4,149,465,216,045.05 | | 11,351,016,417,445.60 |
| Sasaran Kegiatan 4.1 | Tersedianya faskes yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar | | Persentase faskes yang memiliki sarana yang sesuai standar | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Persentase faskes yang memiliki prasarana sesuai standar | 70% | | 75% | - | 80% | - | | |
| | | | Persentase fasilitasi penerbitan perizinan dibidang kesehatan | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| Sasaran Kegiatan 4.2 | Tersedianya faskes yang memiliki perbekalan kesehatan sesuai standar | | Persentase pemenuhan obat sesuai fornas | 60% | | 60% | - | 60% | - | | |
| | | | Persentase pemenuhan bahan habis pakai sesuai dengan kompodium alat kesehatan non elektromedik | 40% | | 40% | - | 40% | - | | |
| | | | Persentase pemenuhan alat kesehatan elektromedik | 80% | | 80% | - | 80% | - | | |
| | | Sub Kegiatan Pembangunan RS beserta sarana dan prasarana Pendukungnya | Jumlah Pembangunan RS beserta sarana dan Prasarana Pendukungnya | 4 Paket | 24,498,787,275.00 | 3 Paket | 4,948,666,002.50 | 3 Paket | 5,443,532,602.75 | | 34,890,985,880.25 |
| | | Pembangunan rumah sakit baru | Jumlah Pembangunan RS Pratama | 1Paket | 20,000,000,000.00 | | | | | | |
| | | Pembangunan RSUD Eko Maulana Ali beserta sarana dan prasarana Pendukungnya | Jumlah pembangunan RSUD Eko Maulana Ali beserta sarana dan prasarana Pendukungnya | 1 Paket | 456,357,275.00 | 1 Paket | 501,993,002.50 | 1 Paket | 552,192,302.75 | | |
| | | Pembangunan RSUD Syafrie Rachman beserta sarana dan prasarana Pendukungnya | Jumlah pembangunan RSUD Syafrie Rachman beserta sarana dan prasarana Pendukungnya | 1 Paket | 3,290,000,000.00 | 1 Paket | 3,619,000,000.00 | 1 Paket | 3,980,900,000.00 | | |
| | | Pembangunan RSUD Depati Bahrin beserta sarana dan Prasarana pendukungnya | Jumlah Pembangunan RSUD Depati Bahrin beserta sarana dan Prasarana pendukungnya | 1 Paket | 752,430,000.00 | 1 Paket | 827,673,000.00 | 1 Paket | 910,440,300.00 | | |
| | | Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas | Jumlah Puskesmas Yang dibangun | 1 Unit | 9,000,000,000.00 | 1 Unit | 15,000,000,000.00 | 1 Unit | | | 24,000,000,000.00 |
| | | | Jumlah Pembangunan Puskesmas | 1 paket | 9,000,000,000.00 | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan | Jumlah pembangunan rumah dinas puskesmas | 6 Paket | 1,810,000,000.00 | | | | | | 1,810,000,000.00 |
| | | Sub kegiatan pengembangan rumah sakit | Jumlah pengembangan bangunan fisik RS | 15 Paket | 72,400,430,000.00 | | | | | | 72,400,430,000.00 |
| | | Pengembangan Rumah sakit Depati Bahrin | Jumlah pengembangan bangunan fisik RS Depati Bahrin | 10 Paket | 47,070,430,000.00 | | | | | | |
| | | Pengembangan Rumah Sakit Eko Maulana Ali | Jumlah pengembangan bangunan fisik RS Eko Maulana Ali | 7 Paket | 5,000,000,000.00 | | | | | | |
| | | Pengembangan Rumah sakit Syafrie Rahman | Jumlah pengembangan bangunan fisik RS Syafrie Rahman | 5 Paket | 20,330,000,000.00 | | | | | | |
| | | Sub kegiatan pengembangan puskesmas | Jumlah penambahan bangunan puskesmas | 5 Paket | 27,375,772,000.00 | 5 Paket | 30,113,349,200.00 | 5 Paket | 33,124,684,120.00 | | 90,613,805,320.00 |
| | | Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit | Jumlah rehabilitasi sedang/berat RS | 2 Paket | 1,320,585,000.00 | 2 Paket | 1,452,643,500.00 | 2 Paket | 1,597,907,850.00 | | 4,371,136,350.00 |
| | | Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Kesehatan Lainnya | 19 Paket | 17,150,000,000.00 | 19 Paket | 18,865,000,000.00 | 19 Paket | 20,751,500,000.00 | | 56,766,500,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | <i>Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</i> | <i>Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</i> | | 1 Paket | 75,000,000.00 | 1 Paket | 82,500,000.00 | 1 Paket | 90,750,000.00 | | 248,250,000.00 |
| | | <i>Sub kegiatan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan</i> | <i>Jumlah Pengadaan Sarana fasilitas pelayanan kesehatan</i> | | 10 Paket | 63,375,409,000.00 | 10 Paket | 69,712,949,900.00 | 10 Paket | 76,684,244,890.00 | | 209,772,603,790.00 |
| | | <i>Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i> | <i>Jumlah Pengadaan Prasarana dan pendukung Fasyankes</i> | | 52 Paket | 35,837,842,135.00 | 52 Paket | 39,421,626,348.50 | 52 Paket | 43,363,788,983.35 | | 118,623,257,466.85 |
| | | <i>Sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan</i> | <i>Jumlah Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan</i> | | 70 Paket | 3,161,868,973,778.00 | 70 Paket | 3,478,055,871,155.80 | 70 Paket | 3,825,861,458,271.38 | | 10,465,786,303,205.20 |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alkes puskesmas</i> | | 12 Paket | 3,072,544,448,000.00 | 12 Paket | 3,379,798,892,800.00 | 12 Paket | 3,717,778,782,080.00 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alat kesehatan labkesda</i> | | 1 Paket | 1,000,000,000.00 | 1 Paket | 1,100,000,000.00 | 1 Paket | 1,210,000,000.00 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan outoclave</i> | | 1 Paket | 3,900,000,000.00 | 1 Paket | 4,290,000,000.00 | 1 Paket | 4,719,000,000.00 | | |
| | | <i>Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Depati Bahrin</i> | <i>- Jumlah alat kesehatan/penunjang medik RSUD Depati Bahrin</i> | | 1 Paket | 13,369,426,000.00 | 1 Paket | 14,706,368,600.00 | 1 Paket | 16,177,005,460.00 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alkes ruang operasi RSUD Depati Bahrin</i> | | 1 Paket | 17,407,172,766.00 | 1 Paket | 19,147,890,042.60 | 1 Paket | 21,062,679,046.86 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alkes kelas I, II, III RSUD Depati Bahrin</i> | | 1 Paket | 2,754,220,226.00 | 1 Paket | 3,029,642,248.60 | 1 Paket | 3,332,606,473.46 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alkes radiologi RSUD Depati Bahrin</i> | | 1 Paket | 17,501,580,536.00 | 1 Paket | 19,251,738,589.60 | 1 Paket | 21,176,912,448.56 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alkes laboratorium RSUD Depati Bahrin</i> | | 1 Paket | 6,061,659,135.00 | 1 Paket | 6,667,825,048.50 | 1 Paket | 7,334,607,553.35 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alat kesehatan UTDRS Depati Bahrin</i> | | 1 Paket | 753,883,130.00 | 1 Paket | 829,271,443.00 | 1 Paket | 912,198,587.30 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alat CSSD Depati Bahrin</i> | | 1 Paket | 1,332,285,760.00 | 1 Paket | 1,465,514,336.00 | 1 Paket | 1,612,065,769.60 | | |
| | | <i>Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Eko Maulana Ali</i> | <i>- Jumlah pengadaan alkes penunjang medik RSUD Eko Maulana Ali</i> | | 1 Paket | 3,601,919,725.00 | 1 Paket | 3,962,111,697.50 | 1 Paket | 4,358,322,867.25 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alkes ruang CSSD Eko Maulana Ali</i> | | 1 Paket | 1,500,000,000.00 | 1 Paket | 1,650,000,000.00 | 1 Paket | 1,815,000,000.00 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alkes ruang laundry RSUD Eko Maulana Ali</i> | | 1 Paket | 350,000,000.00 | 1 Paket | 385,000,000.00 | 1 Paket | 423,500,000.00 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alkes IGD RSUD Eko Maulana Ali</i> | | 1 Paket | 200,000,000.00 | 1 Paket | 220,000,000.00 | 1 Paket | 242,000,000.00 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alkes radiologi</i> | | 1 Paket | 1,000,000,000.00 | 1 Paket | 1,100,000,000.00 | 1 Paket | 1,210,000,000.00 | | |
| | | <i>Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Sjafrie Rahman</i> | <i>- Jumlah Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Sjafrie Rahman</i> | | 1 Paket | 2,040,000,000.00 | 1 Paket | 2,244,000,000.00 | 1 Paket | 2,468,400,000.00 | | |
| | | | <i>- Jumlah pengadaan alkes ruang operasi RSUD Sjafrie Rahman</i> | | 1 Paket | 8,800,000,000.00 | 1 Paket | 9,680,000,000.00 | 1 Paket | 10,648,000,000.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | -Jumlah pengadaan jumanti kit | 12 Paket | 1,850,000,000.00 | 12 Paket | 2,035,000,000.00 | 12 Paket | 2,238,500,000.00 | |
| | | | -Jumlah pengadaan mesin Fogging | 12 Paket | 360,000,000.00 | 12 Paket | 396,000,000.00 | 12 Paket | 435,600,000.00 | |
| | | | -Jumlah pengadaan alat komunikasi sistem pelaporan KLB | 1 Paket | 30,000,000.00 | 1 Paket | 33,000,000.00 | 1 Paket | 36,300,000.00 | |
| | | | -Jumlah Set umum puskesmas | 1 Paket | 182,328,900.00 | 3 Paket | 200,561,790.00 | 3 Paket | 220,617,969.00 | |
| | | | -Jumlah set kesehatan gigi dan mulut | 1 Paket | 187,542,000.00 | 2 Paket | 206,296,200.00 | 2 Paket | 226,925,820.00 | |
| | | | -Jumlah sarana cold chain | 3 Paket | 400,500,000.00 | 3 Paket | 440,550,000.00 | 3 Paket | 484,605,000.00 | |
| | | | -Jumlah alat deteksi dini penyakit tidak menular | 1 Paket | 4,680,000,000.00 | 1 Paket | 5,148,000,000.00 | 1 Paket | 5,662,800,000.00 | |
| | | | -Jumlah penyediaan telemedicine | 1 Paket | 62,007,600.00 | 1 Paket | 68,208,360.00 | 1 Paket | 75,029,196.00 | |
| | | | Jumlah dokumen pelayanan farmasi dan alat kesehatan Dinkes | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | |
| | | | Jumlah dokumen pencatatan dan pelaporan mutasi perbekes Dinkes | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | |
| | | Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | 1 Paket | 1,997,803,000.00 | 1 Paket | 2,197,583,300.00 | |
| | | Sub kegiatan pengadaan obat, vaksin Dinas Kesehatan | Jumlah Pengadaan obat dan Vaksin Dinas Kesehatan | 5 Paket | 5,548,105,883.00 | 5 Paket | 6,102,916,471.30 | 5 Paket | 6,713,208,118.43 | 18,364,230,472.73 |
| | | | -Jumlah pengadaan obat Puskesmas (DAK) | 1 Paket | 1,376,042,433.00 | 1 Paket | 1,513,646,676.30 | 1 Paket | 1,665,011,343.93 | 4,554,700,453.23 |
| | | | -Jumlah Pengadaan Obat Dinas Kesehatan | 1 Paket | 2,025,718,950.00 | 1 Paket | 2,228,290,845.00 | 1 Paket | 2,451,119,929.50 | 6,705,129,724.50 |
| | | | Jumlah dokumen monitoring penggunaan obat (Obat Dinkes) | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | |
| | | | Jumlah obat dan Perbekes yang dicek mutu dan kualitas Dinkes | 150 item | | 150 item | | 150 item | | |
| | | | Bak Kefarmasian | 1 Paket | | 1 Paket | | 1 Paket | | |
| | | Pengadaan obat, vaksin RSUD Depati Bahrin | Jumlah pengadaan obat dan vaksin RSUD Depati Bahrin | 1 Paket | 2,001,140,000.00 | 1 Paket | 2,201,254,000.00 | 1 Paket | 2,421,379,400.00 | 6,623,773,400.00 |
| | | Pengadaan obat, vaksin RSUD Eko Maulana Ali | Jumlah pengadaan obat dan vaksin RSUD Eko Maulana Ali | 1 Paket | 63,918,500.00 | 1 Paket | 70,310,350.00 | 1 Paket | 77,341,385.00 | 211,570,235.00 |
| | | Pengadaan obat, vaksin RSUD Syafie Rachman | Jumlah pengadaan obat dan vaksin RSUD Syafie Rachman | 1 Paket | 81,286,000.00 | 1 Paket | 89,414,600.00 | 1 Paket | 98,356,060.00 | 269,056,660.00 |
| | | Sub kegiatan pengadaan bahan habis pakai | Jumlah Pengadaan bahan habis pakai | 4 Paket | 8,163,308,734.00 | 8 Paket | 8,979,639,607.40 | 8 Paket | 9,877,603,568.14 | 27,020,551,909.54 |
| | | Pengadaan bahan habis pakai Dinas Kesehatan | Jumlah Pengadaan bahan habis pakai Dinas Kesehatan | 1 Paket | 4,438,071,685.00 | 1 Paket | 4,881,878,853.50 | 1 Paket | 5,370,066,738.85 | |
| | | Pengadaan bahan habis pakai RSUD Depati Bahrin | Jumlah Pengadaan bahan habis pakai RSUD Depati Bahrin | 1 Paket | 3,401,140,000.00 | 1 Paket | 3,741,254,000.00 | 1 Paket | 4,115,379,400.00 | |
| | | Pengadaan bahan habis pakai RSUD Eko Maulana Ali | Jumlah Pengadaan bahan habis pakai RSUD Eko Maulana Ali | 1 Paket | 129,181,500.00 | 1 Paket | 142,099,650.00 | 1 Paket | 156,309,615.00 | |
| | | Pengadaan bahan habis pakai RSUD Syafie Rachman | Jumlah Pengadaan bahan habis pakai RSUD Syafie Rachman | 1 Paket | 194,915,549.00 | 1 Paket | 214,407,103.90 | 1 Paket | 235,847,814.29 | |
| | | Sub kegiatan pemeliharaan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah pemeliharaan prasarana pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan | 1 Paket | 266,602,100.00 | 1 Paket | 293,262,310.00 | 1 Paket | 322,588,541.00 | 882,452,951.00 |
| | | | -Jumlah pemeliharaan IPAL RSUD Depati Bahrin | 1 Paket | 200,840,000.00 | 1 Paket | 220,924,000.00 | 1 Paket | 243,016,400.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--|------------------|
| | | | Jumlah Puskesmas yang melakukan pengelolaan laporan ASPAK | 12 Puskesmas | 65,762,100.00 | 12 Puskesmas | 72,338,310.00 | 12 Puskesmas | 79,572,141.00 | | |
| | | | Jumlah Puskesmas yang melakukan visitasi | 12 Puskesmas | | 12 Puskesmas | | 12 Puskesmas | | | |
| | | | Jumlah kegiatan jasa konsultan | 7 Kegiatan | | 7 Kegiatan | | 7 Kegiatan | | | |
| | | | Jumlah dokumen administrasi pengadaan barang dan jasa | 12 dokumen | | 12 dokumen | | 12 dokumen | | | |
| | | Sub kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Pemeliharaan rutin dan berkala alkes/penunjang medik yang terpelihara | 1 Paket | 619,280,000.00 | 1 Paket | 681,208,000.00 | 1 Paket | 749,328,800.00 | | 2,049,816,800.00 |
| | | Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan survey IKM | 100% | 13,820,000.00 | 100% | 15,202,000.00 | 100% | 16,722,200.00 | | 45,744,200.00 |
| | | Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Survey IKM | 1 kali | 13,820,000.00 | 1 kali | 15,202,000.00 | 1 kali | 16,722,200.00 | | |
| Sasaran Kegiatan 4.3 | Meningkatnya teknologi informasi kesehatan terintegrasi | Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi | Persentase puskesmas yang menjalankan sistem informasi manajemen PKM | 100% | 129,475,000.00 | 100% | 142,422,500.00 | 100% | 156,664,750.00 | | 428,562,250.00 |
| | | | Persentase Rumah Sakit yang menjalankan sistem informasi Rumah Sakit (SIRS) | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | Sub kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan | Jumlah MOU pelayanan kesehatan rujukan | 5 MOU | 40,100,000.00 | 5 MOU | 44,110,000.00 | 5 MOU | 48,521,000.00 | | 132,731,000.00 |
| | | | Jumlah Monev SISRUITE di RS | 12 PKM & 3 RS | | 3 RS | - | 3 RS | - | | |
| | | | Jumlah Monev SISRUITE di Puskesmas | 12 PKM | | 12 PKM | | 12 PKM | | | |
| | | | Persentase Puskesmas yang melaksanakan telemedisin di Puskesmas | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Cakupan RS yang melaksanakan SIRS | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan telemedisin di Rumah Sakit | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | Sub kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan | Cakupan Puskesmas yang memiliki sistem informasi kesehatan online | 100% | 89,375,000.00 | 100% | 98,312,500.00 | 100% | 108,143,750.00 | | 295,831,250.00 |
| | | | Persentase terhubungnya jaringan internet seluruh puskesmas | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | | Persentase penggunaan sistem informasi puskesmas yang sudah terbridging dengan P-care | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | | Jumlah Monev Website terhadap Puskesmas | 12 PKM | | 12 PKM | | 12 PKM | | | |
| | | Sub kegiatan pengadaan alat / perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet | Jumlah set komunikasi dan informasi yang diadakan | | | 1 Unit | 300,000,000.00 | 1 Unit | 330,000,000.00 | | |
| Sasaran Program 2.2 | Meningkatnya pemerataan sumberdaya kesehatan sesuai standar | Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan | Persentase faskes dengan SDK sesuai standar | 100% | 418,562,500.00 | 100% | 460,198,750.00 | 100% | 506,216,625.00 | | 1,384,779,875.00 |
| Kegiatan 5 | | Kegiatan pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota | | | 88,932,500.00 | | 97,825,750.00 | | 107,608,325.00 | | 294,366,575.00 |
| Sasaran Kegiatan 5.1 | Tersedianya faskes yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar | | Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP | 90% | | 93% | - | 95% | - | | |
| | | | Cakupan tenaga kesehatan yang memiliki STR | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | Sub kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk SIP | 925 Orang | 88,932,500.00 | 930 Orang | 97,825,750.00 | 935 Orang | 107,608,325.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--|--------------------|
| Kegiatan 6 | | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Faskes dengan jenis tenaga sesuai standar | | 100% | 90,685,000.00 | 100% | 99,753,500.00 | 100% | 109,728,850.00 | | 300,167,350.00 |
| | | Sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan | Persentase tenaga kesehatan yang dilakukan pemantauan sesuai standar | | 85% | 90,685,000.00 | 87% | 99,753,500.00 | 90% | 109,728,850.00 | | |
| Kegiatan 7 | | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi | | 85% | 225,000,000.00 | 87% | 247,500,000.00 | 90% | 272,250,000.00 | | 744,750,000.00 |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan Kompetensi teknis Sumber daya manusia kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga kesehatan yang sudah terlatih sesuai standar | | 85% | 225,000,000.00 | 87% | 247,500,000.00 | 90% | 272,250,000.00 | | |
| | | | Persentase pegawai yang lulus diklat kesehatan | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| Sasaran Program 2.3 | Meningkatnya pengawasan keamanan obat dan makanan minuman | Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minuman | Persentase pengawasan toko obat, apotek, dan keamanan pangan yang beredar sesuai standar | | 60% | 38,932,000.00 | 65% | 42,825,200.00 | 70% | 47,107,720.00 | | 128,864,920.00 |
| Kegiatan 8 | | Kegiatan pemberian izin apotik, toko obat, alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) | | | | 25,187,000.00 | | 27,705,700.00 | | 30,476,270.00 | | 83,368,970.00 |
| Sasaran Kegiatan 7.1 | Meningkatnya keamanan produk pangan industri rumah tangga | | Cakupan pengawasan sarana kefarmasian | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan, toko obat, toko kesehatan, optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) | Jumlah penerbitan rekomendasi perizinan usaha dibidang kesehatan | 78 Faskes | 78 Faskes | 25,187,000.00 | 78 Faskes | 27,705,700.00 | 78 Faskes | 30,476,270.00 | | 83,368,970.00 |
| Kegiatan 9 | | Kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga | Cakupan IRTP yang memiliki sertifikat PIRT | | 100% | 13,745,000.00 | 100% | 15,119,500.00 | 100% | 16,631,450.00 | | 45,495,950.00 |
| | | Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan indutri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga | Jumlah dokumen pengelolaan data pembuatan sertifikat PKP dan PIRT | | 1 Dokumen | 13,745,000.00 | 1 Dokumen | 15,119,500.00 | 1 Dokumen | 16,631,450.00 | | 45,495,950.00 |
| | | | Jumlah dokumen pengawasan/MONEV sarana produksi dan distribusi pangan | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | | |
| | | | Jumlah dokumen kegiatan pendampingan untuk pengawasan pemeriksaan bersama BPOM DAK Non Fisik | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | | |
| | | | Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah | | 61 | | 62 | - | 63 | - | | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang akuntabel | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Strategis 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi perangkat daerah | | Hasil evaluasi AKIP perangkat daerah | | 80 | | 81 | - | 82 | - | | #REF! |
| Sasaran Program ke-1 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30) | | 26 | 135,827,932,851.00 | 26.25 | 149,410,726,136.10 | 26.50 | 164,351,798,749.71 | | 449,590,457,736.81 |

| | | | Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15) | | 10.75 | | 10.80 | - | 10.85 | | - | |
|-----------------------|---|---|--|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---|--------------------|
| Kegiatan 10 | | Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar | | 100% | 897,737,250.00 | 100% | 987,510,975.00 | 100% | 1,086,262,072.50 | | 2,971,510,297.50 |
| | | | Persentase pelaporan kinerja yang sesuai standar | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | Sub kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun | | 8 Dokumen | 735,573,250.00 | 8 Dokumen | 809,130,575.00 | 8 Dokumen | 890,043,632.50 | | |
| | | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja yang disusun | | 20 Dokumen | 162,164,000.00 | 20 Dokumen | 178,380,400.00 | 20 Dokumen | 196,218,440.00 | | |
| Sasaran Program ke-2 | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI | | 0% | | 0% | - | 0% | - | | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar | | 100% | 68,283,160,900.00 | 100% | 75,111,476,990.00 | 100% | 82,622,624,689.00 | | 226,017,262,579.00 |
| | | Subkegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani | | 12 bulan | 68,283,160,900.00 | 12 bulan | 75,111,476,990.00 | | 82,622,624,689.00 | | |
| Sasaran Program ke -3 | Meningkatnya efektivitas organisasi dan Tata Laksana Dinkes | | Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah | | 0.8 | | 0.9 | - | 1 | - | | |
| Sasaran Program ke -4 | Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik | | Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase arsip DINKES yang dikelola sesuai aturan | | 100% | 1,204,557,800.00 | 100% | 1,325,013,580.00 | 100% | 1,457,514,938.00 | | 3,987,086,318.00 |
| | | Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani | | 12 bulan | 601,305,800.00 | 12 bulan | 661,436,380.00 | 12 bulan | 727,580,018.00 | | |
| | | Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 12 bulan | 486,188,000.00 | 12 bulan | 534,806,800.00 | 12 bulan | 588,287,480.00 | | |
| | | Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor yang tertangani | | 12 bulan | 117,064,000.00 | 12 bulan | 128,770,400.00 | 12 bulan | 141,647,440.00 | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD dalam kondisi baik | | 100% | 10,182,474,000.00 | 100% | 11,200,721,400.00 | 100% | 12,320,793,540.00 | | 33,703,988,940.00 |
| | | Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Opeasional/ Lapangan. | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | 12 bulan | 247,840,000.00 | 11 Unit | 272,624,000.00 | 11 Unit | 299,886,400.00 | | |
| | | Subkegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | | 12 bulan | 48,450,000.00 | 69 Unit | 53,295,000.00 | 69 Unit | 58,624,500.00 | | |
| | | Subkegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya(termasuk DID) | Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi | | 1 Paket | 9,886,184,000.00 | 1 Paket | 10,874,802,400.00 | 1 Paket | 11,962,282,640.00 | | |
| | | | Jumlah pembangunan pagar di Lingkungan kantor Dinas Kesehatan | | | | 1 Paket | | 1 Paket | | | |
| | | | Jumlah pengaspalan di lingkungan Dinas Kesehatan | | | | 1 Paket | | 1 Paket | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah | | 100% | 307,085,000.00 | 100% | 337,793,500.00 | 100% | 371,572,850.00 | | 1,016,451,350.00 |
| | | Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani | | 12 bulan | 307,085,000.00 | 12 bulan | 337,793,500.00 | 12 bulan | 371,572,850.00 | | |

| | | | Jumlah layanan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tertangani | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | | |
|----------------------|---|---|--|-------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah | | 100% | 996,887,000.00 | 100% | 1,096,575,700.00 | 100% | 1,206,233,270.00 | | 3,299,695,970.00 |
| | | Subkegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | | 1 Paket | 471,560,900.00 | 1 Paket | 518,716,990.00 | 1 Paket | 570,588,689.00 | | |
| | | Subkegiatan Pengadaan Mebel (termasuk DID) | Jumlah Meubeleir yang diadakan | | 1 Paket | 525,326,100.00 | 1 Paket | 577,858,710.00 | 1 Paket | 635,644,581.00 | | |
| Sasaran Program ke-5 | Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah | | Indeks Profesionalisme ASN Lingkup Perangkat Daerah | 61.77 | 62,00 | | 62,50 | 0 | 63,00 | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Aparatur Dinkes bekerja tepat waktu | | 100% | 889,660,000.00 | 100% | 978,626,000.00 | 100% | 1,076,488,600.00 | | 2,944,774,600.00 |
| | | | Persentase Aparatur Yang memperoleh Sertifikat Pengembangan Kompetensi | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | | Persentase Aparatur Dinkes berkinerja baik | | 100% | | 100% | - | 100% | - | | |
| | | Subkegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian olahraga yang tersedia | | 16 stel | 884,660,000.00 | 16 stel | 973,126,000.00 | 16 stel | 1,070,438,600.00 | | |
| | | | Jumlah Pakaian Seragam | | 1166 Pcs | | 1166 Pcs | | 1166 Pcs | | | |
| | | Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | | 1 org | 5,000,000.00 | 5 org | 5,500,000.00 | 5 org | 6,050,000.00 | | |
| | | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | Opini Kinerja BLUD | | WTP | 53,066,370,901.00 | WTP | 58,373,007,991.10 | WTP | 64,210,308,790.21 | | |
| | | Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | - Operasional BLUD | | 12 bulan | 53,066,370,901.00 | 12 bulan | 58,373,007,991.10 | 12 bulan | 64,210,308,790.21 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Eko Maulana Ali | - Operasional BLUD RSUD Eko Mulana Ali | | 12 bulan | 440,000,000.00 | 12 bulan | 484,000,000.00 | 12 bulan | 532,400,000.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Syafie Rachman | - Operasional BLUD RSUD Syafie Rachman | | 12 bulan | 212,870,900.00 | 12 bulan | 234,157,990.00 | 12 bulan | 257,573,789.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Depati Bahrin | - Operasional BLUD RSUD Depati Bahrin | | 12 bulan | 40,000,000,000.00 | 12 bulan | 44,000,000,000.00 | 12 bulan | 48,400,000,000.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kenanga | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Kenanga | | 12 bulan | 880,000,000.00 | 12 bulan | 968,000,000.00 | 12 bulan | 1,064,800,000.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Belinyu | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Belinyu | | 12 bulan | 1,550,450,000.00 | 12 bulan | 1,705,495,000.00 | 12 bulan | 1,876,044,500.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunung Muda | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Gunung Muda | | 12 bulan | 393,580,000.00 | 12 bulan | 432,958,000.00 | 12 bulan | 476,231,800.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sungailiat | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Sungailiat | | 12 bulan | 1,820,720,000.00 | 12 bulan | 2,002,792,000.00 | 12 bulan | 2,203,071,200.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Baturusa | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Baturusa | | 12 bulan | 871,750,000.00 | 12 bulan | 958,925,000.00 | 12 bulan | 1,054,817,500.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pemali | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Pemali | | 12 bulan | 1,115,180,000.00 | 12 bulan | 1,226,698,000.00 | 12 bulan | 1,349,367,800.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bakam | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Bakam | | 12 bulan | 999,130,000.00 | 12 bulan | 1,099,043,000.00 | 12 bulan | 1,208,947,300.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Riausilip | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Riausilip | | 12 bulan | 1,100,000,000.00 | 12 bulan | 1,210,000,000.00 | 12 bulan | 1,331,000,000.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Puding Besar | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Puding Besar | | 12 bulan | 1,100,000,001.00 | 12 bulan | 1,210,000,001.10 | 12 bulan | 1,331,000,001.21 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Petaling | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Petaling | | 12 bulan | 1,449,030,000.00 | 12 bulan | 1,593,933,000.00 | 12 bulan | 1,753,326,300.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sinar Baru | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Sinar Baru | | 12 bulan | 443,190,000.00 | 12 bulan | 487,509,000.00 | 12 bulan | 536,259,900.00 | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Penagan | - Opini Kinerja BLUD puskesmas Penagan | | 12 bulan | 690,470,000.00 | 12 bulan | 759,517,000.00 | 12 bulan | 835,468,700.00 | | |
| | | JUMLAH TOTAL | | | | 3,627,022,649,376.00 | | 3,989,724,914,313.60 | | 4,388,697,405,744.96 | | 12,005,444,969,434.60 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 7.1 berikut. Indikator kinerja dimaksud menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------|----------------------------------|
| | | Tahun 2019 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
| 1 | Angka Kematian | | | | | | |
| | AKI/100.000 KH | 63,00 | 61,00 | 60,00 | 58,00 | 58,00 | |
| | AKB/1.000 KH | 3,80 | 3,2 | 3,15 | 3,1 | 3,1 | |
| 2 | Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk | 0,038 | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| 3 | Angka Kesakitan | 0,45 | 0,4 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 88,45 | 88,50 | 88,55 | 88,55 | |
| 5 | Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan | 74,30 | 74,35 | 74,40 | 74,45 | 74,45 | |

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sebagaimana tertera pada tabel 7.1 dioperasionalkan

pencapaiannya oleh bidang-bidang yang terdapat dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan dan diukur melalui indikator kinerja program. Definisi operasional dan perhitungan pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka diformulasikan sebagai berikut :

Tabel 7.2
DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PERHITUNGAN |
|-----|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat | Angka Kematian Ibu | $K = \frac{\Sigma \text{ kematian ibu hamil, bersalin dan nifas selama 1 tahun}}{\Sigma \text{ Jumlah lahir hidup selama 1 tahun}} \times 100.000KH$ |
| | | Angka Kematian Bayi | $K = \frac{\Sigma \text{ Jumlah kematian bayi selama 1 tahun}}{\Sigma \text{ Jumlah lahir hidup selama 1 tahun}} \times 1.000 KH$ |
| | | Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk | $K = \frac{\Sigma \text{ Jumlah Kasus Gizi buruk balita berdasarkan BB/TB di suatu wilayah pada periode tertentu}}{\Sigma \text{ jumlah seluruh balita pada periode tertentu di suatu wilayah}} \times 100\%$ |
| | | Angka Kesakitan | $K = \frac{\Sigma \text{ Indeks Penyakit Menular dan Tidak Menular}}{2} \times 100\%$ |
| 2. | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Persepsi Kinerja Unit Pelayanan |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinkes | Hasil Evaluasi AKIP Dinkes | Nilai AKIP |

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan merupakan kerangka acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .

Perubahan Rencana strategis Dinas Kesehatan disusun sebagai rancangan kegiatan 5 (lima) tahunan pada Dinas Kesehatan yang mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2018–2023 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka setiap tahun selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan.

SUNGAILIAT, DESEMBER 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA


Then Suyanti
THEN SUYANTI
NIP. 19770919 200501 2 012